

**UPAYA ASEAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT CINA
SELATAN TAHUN 2010-2015**

Oleh:

Anugerah Baginda Harahap

Email: anugerahbaginda@yahoo.com

Pembimbing: Afrizal, S.IP M.A

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes roles of ASEAN in resolution conflict of South China Sea in 2010-2015. South China Sea are one of High Seas in International seas that have a 3,5 million mil. South China Sea has a big potency in a mineral resources and as a international matirim ways. Since 1974 Tiongkok has claim South China Sea as a their territory and it's make a complain from the ASEAN member state especially Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Vietnam and Filiphina.

The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the roles of ASEAN in resolution conflict of South China Sea. The theories applied in this research are pliralism perspective with the international organization theory by Clive Archer.

The result of this research shows that the roles of ASEAN in resolution conflict of South China Sea are used by diplomacy ways approach and instrument of international law. Some effort of ASEAN are in 2011 ASEAN has implemented code of Conduct dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea, ASEAN member has optimaled ASEAN Regional Forum ways and ASEAN Political Security Community in resolution conflict of South China Sea and ASEAN members held a ministrial meeting to create a peacefull in South Cina Seas territory.

Key words: roles, ASEAN, conflic, South China Sea.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian diplomasi yang menganalisa mengenai upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Secara geografis Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km². Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan

Pasig. Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3° lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik serkaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam

menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan pluralisme. Menurut Diana L. Eck, pluralisme merupakan suatu sistematis serta kerangka dimana terdapat beberapa kelompok atau bagian dari sistem lainnya dan saling berhubungan dengan basis saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dalam perspektif pluralisme dijelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan. Terdapat

empat asumsi penting dalam perspektif pluralisme, yaitu:

1. Aktor non negara (non state actors) merupakan salah satu unsur penting dalam dunia politik, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah, MNCs, kelompok, ataupun individu.
2. Menurut kaum pluralis, negara bukanlah aktor tunggal (unitary actor), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Dalam hal ini, negara terdiri dari individu (rakyat), kelompok kepentingan, dan birokrat lainnya.
3. Berbeda dengan kaum realis, kaum pluralis beranggapan bahwa negara bukanlah aktor rasional. Dalam pembuatan keputusan, aktor politik akan cenderung saling berkompromi, tergabung dalam sebuah forum atau kelompok lainnya yang menggunakan posisi tawar (bargaining power), dan kepentingan-kepentingannya.
4. Agenda internasional bagi kaum pluralis lebih bersifat ekstensif. Masalah-masalah

yang dibahas tidak lagi terpaku pada masalah power atau national security, tetapi sudah meluas pada masalah-masalah sosial ekonomi, lingkungan, dan budaya.

ASEAN adalah forum komunikasi tingkat regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini fokus ASEAN dikenal dengan tiga pilar yaitu pilar keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Dengan adanya perspektif pluralis yang telah dikemukakan, maka tingkat analisis yang digunakan penulis adalah tingkat analisis perilaku kelompok. Tingkat analisis ini mengasumsikan bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional. Individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebenarnya adalah hubungan atau interaksi antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Dengan demikian, dalam memahami hubungan internasional, kita harus mempelajari perilaku-perilaku kelompok kecil atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori organisasi

internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya. Menurut Leroy Bennet, fungsi utama dari organisasi internasional yaitu untuk mengadakan upaya-upaya kerjasama antarnegara dalam bidang-bidang tertentu dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi seluruh maupun sebagian besar anggotanya. Selain itu penulis juga menggunakan teori peranan dalam organisasi internasional yaitu Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem.

Peranan dari struktur tunggal, maupun bersusun ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankan perannya tadi. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan

suatu peranan. Clive Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Jika dilihat dari keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Berdasarkan tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau Intergovernmental Organization (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau International Non-governmental Organization (INGO). Berdasarkan jangkauan keanggotaan, organisasi ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan ada yang keanggotaannya mencakup seluruh wilayah dunia.

Dalam permasalahan upaya Negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim Tiongkok ini, maka ASEAN berperan sebagai organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau Intergovernmental Organization (IGO) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai forum komunikasi antar

pemerintah negara dalam satu kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara historis, Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km².¹ Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga perannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong). Min, Jiulong,

¹ www.anneahira.com, Laut Cina Selatan, 2011, diakses tanggal 24 Mei 2013

Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.² Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3° lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan

² *Ibid.* Hlm 21

regional selama bertahun-tahun.³ Penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan ini adalah pada tahun 1968. Menurut data dari *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of Tiongkok* (RRC) memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton ($1,60 \times 10^{10}$ kg). Fakta tersebut menempatkan Kepulauan Spratly sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar keempat di dunia.

Pertama, wilayah kawasan Laut Cina Selatan punya potensi ekonomi terutama kandungan minyak dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional. Kedua, negara-negara yang bersengketa sangat membutuhkan minyak untuk kelangsungan industri maupun kelangsungan ekonomi nasionalnya. Sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan (South Tiongkok Sea, atau SCS) ini diawali oleh klaim Tiongkok atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992.⁴ Hal ini dipicu oleh Tiongkok pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Tiongkok

³

<http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>,

⁴ *Ibid.* Hlm 12

mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Tiongkok Selatan, utamanya negara anggota ASEAN⁵ (Association of Southeast Asian Nations). Adapun negara-negara tersebut, antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.

Di Laut Cina Selatan terdapat empat kepulauan, dan karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, (seperti perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim Tiongkok atas kepulauan di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1974, Tiongkok menganggap Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya.

Pada tahun 1974 ketika Tiongkok menginvasi kepulauan Paracel (yang diklaim Vietnam). Pada tahun 1979, Tiongkok dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan

⁵ www.eia.gov, US Energy Information and Administration, South Tiongkok Sea, 2008, diakses tanggal 24 Mei 2013.

angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam. Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam menganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya.⁶, klaim kepemilikan atas kawasan Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok sejak dekade 1970-an didasarkan pada tiga hal pokok yakni kemajuan ekonomi, politik dan kebutuhan akan pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat memungkinkan adanya peningkatan pemanfaatan energi minyak. Bagi Tiongkok, dalam jangka panjang cadangan minyak Laut Cina Selatan meskipun dalam jumlah yang belum pasti tetap akan digunakan untuk menopang kebutuhan dalam negeri.

Kebutuhan akan cadangan minyak berlebih dari sumber baru sudah dirasakan sejak pertengahan tahun 1970-an yakni ketika produksi minyak Tiongkok mengalami penurunan. Faktor eksternal yakni krisis minyak dunia juga turut memengaruhi perekonomian dalam negeri akan pentingnya cadangan

⁶ Evelyn Goh, 2005, Meeting the Tiongkok Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, East-West Center Washington, hal. 31

minyak. Kemerosotan ini terus berlanjut sampai dekade berikutnya meskipun tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Kemungkinan fakta ini dipengaruhi oleh cepatnya pertumbuhan penduduk dan industrialisasi selama program modernisasi. Kecenderungan itu berdampak pada permintaan masyarakat terhadap sumber energi mineral terus bertambah. Sebagai konsekuensinya, Tiongkok harus meningkatkan impor minyak dan gas, memperbaiki kapabilitas berproduksi atau kerjasama gabungan dalam mengeksplorasi daerah tepi pantai. Meningkatnya kebutuhan Tiongkok akan minyak terlihat dari kebijakan impor pada tahun 1993. Menurut penilaian Hisahiro Kanayama dari Institute for International Policy Studies sampai bulan Juni 1994 diperkirakan kebutuhan energi Tiongkok terutama minyak akan melebihi jumlah produksinya. Guna mengurangi impor minyak, dalam jangka panjang negara ini memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai tempat memperoleh ladang minyak baru dan sekaligus sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

Dari aspek politik, klaim tersebut berkaitan dengan strategi politik luar negeri Tiongkok terhadap negara-negara Asia Tenggara. Laut

Cina Selatan dianggap sebagai teritorial Tiongkok untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara aktual. Keterlibatan Beijing dalam persengketaan tersebut semata-matahanya untuk menegaskan kembali perannya sebagai negara besar dalam percaturan regional. Berakhirnya konflik Kamboja telah mengubah peran Beijing yang sebelumnya memanfaatkan isu tersebut untuk menarik negara-negara non-komunis ke dalam pengaruhnya. Melalui langkah ini, Tiongkok dapat mengisolasi posisi Vietnam secara regional.

Persoalan Laut Cina Selatan ini sangat berkaitan erat dengan negara-negara yang merupakan anggota ASEAN, karena beberapa negara ASEAN berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang tentunya juga punya kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan, sehingga ASEAN dituntut untuk menyatakan sikap dalam persoalan tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan adalah munculnya perpecahan di ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, sehingga ditakutkan konflik tersebut akan menjadi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara.

Dampak buruk lainnya dari permasalahan Laut Cina Selatan

tersebut adalah terjadinya perpecahan di antara anggota-anggota ASEAN seperti Kamboja yang menolak gagasan yang mengatakan bahwa ASEAN harus turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut pemerintah Kamboja, permasalahan tersebut cukup diselesaikan melalui penyelesaian secara bilateral dan tidak perlu adanya suatu deklarasi bersama seluruh anggota ASEAN terkait penyelesaian konflik Laut Cina Selatan tersebut. Beberapa upaya penting yang dilakukan oleh ASEAN dalam Menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah sebagai berikut:

1. Negara Anggota ASEAN Mengadakan Pertemuan dalam Menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan

Pada tahun 1971, ASEAN sudah berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan, ketika para Menteri Luar Negeri menandatangani *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Deklarasi ZOPFAN itu merupakan pengejawantahan dan sikap ASEAN yang tidak mau menerima keterlibatan terlalu jauh dari negara-negara besar dari luar regional, seperti Amerika Serikat, RRC, Uni Soviet dan Jepang. ASEAN mengusahakan pengakuan dan

penghormatan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral oleh kekuatan luar seraya memperluas kerja sama antara mereka sendiri sebagai prasyarat bagi “memperkokoh kekuatan, kesetiakawanan dan keakraban mereka”.⁷

Pada salah satu lawatannya di Vietnam Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mengutarakan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh bahwa kedua negara berhasil mendiskusikan beberapa ide yang berkaitan dengan hal-hal yang mempersatukan ASEAN. Ide tersebut diidentifikasi enam prinsip utama, antara lain:

1. Perlunya reaffirmasi mengenai the Declaration on the Conduct of Parties kepada semua pihak di Laut Tiongkok Selatan
2. Perlunya afirmasi guidelines Declaration on the Conduct of Parties (DOC)
3. Perlunya afirmasi mengenai pentingnya suatu Code of Conduct
4. Penghormatan terhadap hukum internasional dan
5. Konvensi PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS, serta
6. Penyelesaian masalah secara

⁷ C.P.F. Luhulima, 1997, ASEAN Menuju Postur Baru, CSIS, Jakarta, hlm. 53

damai sesuai dengan UNCLOS

Selain melakukan lawatan di kawasan ASEAN, pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi di Jakarta Agustus lalu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dalam pertemuan ini Presiden Indonesia dan Menteri Luar Negeri Tiongkok menggaris bawahi pentingnya ASEAN serta Tiongkok untuk fokus pada penyusunan deklarasi tata berperilaku (DOC) menuju kode tata perilaku (COC).

2. Tahun 2011 ASEAN menerapkan kode etik konflik laut Cina Selatan

Sejauh ini upaya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik terbuka adalah dengan penyusunan Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan (Code of Conduct on South Tiongkok Sea). Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi di antara negara-negara ASEAN untuk membuat aturan larangan berkonflik dengan sesama anggota maupun dengan negara mitra di luar kawasan.

Selain untuk menyelesaikan konflik, Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini juga diharapkan nantinya dapat mengembangkan kerja sama di Laut Cina Selatan antar sesama negara anggota maupun dengan negara di luar kawasan ASEAN. Kegagalan ASEAN dalam memberikan solusi bagi upaya penyelesaian sengketa hanya akan membuat Vietnam dan Filipina beralih ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang Cina di kawasan. Hingga kini Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tetap netral dalam sengketa yang terjadi meskipun Filipina telah meminta bantuan secara tidak langsung kepada Amerika Serikat. Pada akhirnya permasalahan sengketa wilayah antar beberapa negara Asia Tenggara dengan Cina turut menjadi permasalahan ASEAN mengingat dampaknya yang tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan namun juga global.

3. ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Konstelasi politik dan keamanan global semakin beragam, dengan dinamika yang terjadi di berbagai sub regional dan regional. Dinamika global kini terfokus pada geostrategis di kawasan Pasifik,

dimana kekuatan negara-negara selama ini seperti Amerika Serikat, Russia, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Dari beberapa negara kuat dan memiliki kapasitas bargaining position tinggi, yakni yang menjadi ketertarikan di masa kini adalah kebangkitan Tiongkok.

Dinamika Asia Tenggara yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi faktor eksternal berasal dari Asia Timur (Tiongkok), dan Asia Selatan (India), yang merupakan dua sumber pengaruh dinamika yang pertemuannya di Asia Tenggara. Berarti dinamika yang terjadi di Asia Tenggara berpotensi menimbulkan kondisi ketidakstabilan regional, sehingga mendapatkan respon dan tindakan internasional. Begitu pentingnya peran kedua negara ini dalam pengaruh dinamika Asia Tenggara, sebab itu ASEAN menuntut untuk memprioritaskan terhadap keamanan regional menjadi pengatur stabilitas dinamika yang terjadi di Asia Tenggara.

Tiongkok sendiri, bagi ASEAN sangat dibutuhkan dibanding beberapa negara di Asia Timur lainnya, karena Tiongkok memiliki kepentingan geopolitik negara tersebut dan sekaligus mengendalikan sistem maritim ke wilayahnya. Terkait dengan

Laut Cina Selatan yang menjadi bagian geografis di Asia Tenggara, dimana sebagian masyarakat negara anggota ASEAN menemukan potensi kapitalnya disana, dan perairan tersebut menjadi potensi bagi Cina membangun kekuatan baru di Asia Pasifik melalui klaim wilayah perairan Laut Cina Selatan.

Klaim ini menimbulkan ujian bagi ASEAN untuk tegas menanggapi sifat eksekutif Tiongkok atas klaimnya. Jika ditarik melalui pendekatan pada prinsip fundamental ASEAN yang tercantum pada TAC (Treaty of Amity and Cooperation) dalam poinnya menjadi perhatian yakni non-interference dan menjaga kedaulatan setiap negara-negara dari ancaman intervensi dari luar.

Selama ini perkembangan dinamika di ASEAN dari beberapa dekade terakhir perubahannya sangat signifikan, hal ini mencoba mempertanyakan kemampuan ASEAN dalam menyikap konflik-konflik yang berasal dari internal dan eksternal, ditambahkan konflik sengketa Laut Cina Selatan merupakan perpaduan konflik internal antar negara anggota ASEAN dan eksternal dari Tiongkok yang mengklaim atas teritorial. Sejumlah tantangan yang dialami ASEAN dalam permasalahan keamanan harus tetap

mempertahankan keberadaan non-interference yang didasari oleh ASEAN Way.

Pada masa dekade akhir ini, ASEAN sebagai institusi mengandalkan sistem rejim ARF dalam isu keamanan tradisional dan non-tradisional issue dengan mencerminkan nilai-nilai ASEAN Way, dengan sukses dalam konflik sengketa Kuil Preah Vihear melalui CBM (Confidence Building Measures), kerjasama keamanan yang berujung sukses yakni Aceh Monitoring Mission, selain itu sukses mengajak Tiongkok untuk duduk bersama dalam konflik sengketa Laut Cina Selatan.

Dengan dimulai dari legitimasi Myanmar bergabung di ASEAN menimbulkan cara pandang yang berubah bagi nilai-nilai ASEAN Way dan prinsip fundamental ASEAN yakni non-interference yang sedikit bergeser menjadi constructive engagement dan proactive engagement. Pada konsepnya bahwa negara ASEAN bersikap proaktif untuk membantu suatu negara yang mengalami permasalahan politik dan konflik keamanan manusia, melalui bantuan ekonomi dan politik demokrasi, tetapi tetap tidak melanggar prinsip kedaulatan.

Dalam kasus sengketa Laut

Cina Selatan, ASEAN berada diposisi krusial dimana Tiongkok telah melakukan latihan angkatan lautnya di daerah perairan tersebut, melalui ARF atas kesediaan Tiongkok untuk terlibat dengan ASEAN, muncul anggapan bahwa Tiongkok akan semakin agresif dalam konflik sengketa Laut Cina Selatan. Ajang diskusi dan kerjasama diforum ARF, hanya semata menggunakan pendekatan cooperative security, otomatis pencapaiannya bukan melalui instrument militer. Dalam hal ini komunitas keamanan didefinisikan sebagai komunitas negara yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka tidak dengan penggunaan kekuatan militer, tetapi dengan cara-cara damai (peaceful changes). Krusialnya, negara anggota ASEAN pun masih lemah dalam peningkatan kerjasama militer, kemudian sikap setiap keanggotaan ASEAN menjadi terbelah dan berteguh pada non-interference, hal ini semakin memperkeruh keadaan dinamika sengketa Laut Cina Selatan, dengan akibat ASEAN belum mampu menciptakan balance of power untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok.

Ekspresi geopolitik Tiongkok, terkait Laut Cina Selatan terlihat dengan kebijakan Tiongkok yang dibawa dalam ASEAN Regional Forum (ARF), salah satunya

menyetujui The Declaration on the Conduct of Parties in the South Tiongkok Sea, pada tahun 2002. Dalam deklarasi tersebut Tiongkok sepakat bahwa sengketa perairan tidak akan menjadi isu internasional dan isu multilateral. Delapan tahun setelah deklarasi tersebut dengan Tiongkok mengenai konflik perairan ini diratifikasi, kejelasan status atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracel belum jelas.

Optimalisasi peran ASEAN Regional Forum sebagai badan yang mampu lebih menjawab tantangan keamanan, kedepannya, terutama permasalahan isu tradisional dan non-tradisional. Beberapa optimalisasi peran Asean Regional Forum dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah sebagai berikut:

1. Dekonstruksi prinsip non-interference (Constructive Engagement dan Proactive Engagement),
2. Memaksimalkan implementasi kebijakan Code of Conduct dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea, dan
3. Menyatukan perspektif dan mengesampingkan kepentingan antar negara-negara anggota ASEAN.
ASEAN berharap terhadap

penjelasan diatas, untuk memenuhi upaya-upaya penyelesaian konflik yang berkempanjangan direalisasikan, alhasil akar permasalahan tidak muncul kembali. Melalui alternatif otoritas yang jelas dan baik dalam bentuk organisasi kawasan yang diharapkan mampu memenuhi cita-cita untuk mempromosikan perdamaian yang tercantum di dalam Piagam ASEAN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ARF harus di dekonstruksi untuk beradaptasi terhadap dinamika ASEAN sehingga juga mampu menjaga relevansi dan signifikan dalam proses mengelola dan mengupayakan penyelesaian konflik berkepanjangan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di ASEAN.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah dilakukan dengan cara perundingan damai berdasarkan peraturan hukum internasional. Pendekatan yang digunakan oleh ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan dengan Tiongkok menggunakan pendekatan cooperative security, otomatis pencapaiannya bukan melalui instrument militer.

Dalam hal ini komunitas keamanan didefinisikan sebagai komunitas negara yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka tidak dengan penggunaan kekuatan militer, tetapi dengan cara-cara damai (peaceful changes).

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km². Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Oleh karena itu, dengan pentingnya posisi strategis Laut Cina Selatan yang berada di wilayah perairan Laut negara Asia Tenggara, maka diperlukan upaya oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan konflik sengketa Laut Cina Selatan dengan Tiongkok secara bersama-sama. Adapun upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 ASEAN menerapkan *Code of Conduct dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea*.
2. Negara anggota ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dan ASEAN Political Security Community dalam penyelesaian konflik keamanan terkait laut Cina Selatan.
3. Negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London. Allen & Unwid Ltd.

Bandoro Bantarto. 2005. *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Bennett, Alvin LeRoy. 1983. *International Organizational : Principles and Issues*. New Jersey : Prentice-Hall.

C.P.F. Luhulima, 1997, *ASEAN Menuju Postur Baru*, CSIS, Jakarta.

Evelyn Goh, 2005, *Meeting the Tiongkok Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington.

Website

<http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>,

www.anneahira.com, Laut Cina Selatan, 2011, diakses tanggal 24 Mei 2013

www.eia.gov, US Energy Information and Administration, South Tiongkok Sea, 2008, diakses tanggal 24 Mei 2013.